JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 3, 2025

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DAN TAMAN BERMAIN BERSAHAJA DI KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Zaidah Safitri [1], Arif Budiman [2], Gusti Muhammad Hidayatullah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: safitri30zaidah12@gmail.com

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan terbuka yang ditumbuhi vegetasi, baik alami maupun buatan, yang berfungsi sebagai ruang sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Pengembangan RTH dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan, berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 72 Tahun 2020, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil menunjukkan bahwa implementasi program tergolong cukup baik, terlihat dari koordinasi antarpetugas, pelaksanaan tugas sesuai wewenang, dan konsistensi kerja. Namun, ditemukan kendala berupa komunikasi yang kurang efektif kepada masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tidak adanya insentif bagi petugas. Untuk meningkatkan efektivitas program, disarankan adanya dukungan pemerintah melalui peningkatan fasilitas, pelatihan, serta sosialisasi rutin guna mendorong partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian serta fungsi sosial dan ekologis RTH.
Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Implementasi Program, Daha Selatan.

ABSTRACT

Green Open Space (GOS) refers to an open area where vegetation grows naturally or is intentionally planted, serving as a space for community interaction and environmental preservation. This study aims to examine the implementation of the Green Open Space and Simple Playground Development Program in Daha Selatan Sub-district, Hulu Sungai Selatan Regency, as regulated by Regent Regulation No. 72 of 2020, and to identify factors influencing its execution. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving 13 purposively selected informants. The findings indicate that the program implementation is fairly effective, reflected in good coordination among staff, proper task execution, and positive attitudes of implementers. Nevertheless, several obstacles were identified, such as unclear and inconsistent communication with the public, limited facilities and infrastructure, low prioritization of playground development, and lack of incentives for personnel. To enhance program effectiveness, the study recommends stronger government support through training, improved infrastructure, and consistent community engagement via regular socialization. Active public participation is essential to sustain the environmental and social functions of GOS.
***Keywords**: Green Open Space, policy implementation, Daha Selatan.*

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah komponen krusial dalam perencanaan tata ruang wilayah yang memiliki peran signifikan dalam mendukung fungsi lingkungan hidup, interaksi sosial masyarakat, serta menambah nilai keindahan dan estetika kawasan sekitarnya. Di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan, keberadaan dan pengelolaan RTH menjadi tantangan yang harus diatasi secara sistematis. Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam memastikan ketersediaan, pemanfaatan, serta keberlanjutan RTH melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020. Salah satu implementasi nyata dari kebijakan tersebut adalah pelaksanaan Program Pengembangan RTH dan Taman Bermain Bersahaja yang terletak di Kecamatan Daha Selatan.. Meskipun program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas ruang publik yang ramah lingkungan, pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala. Hasil pengamatan awal menunjukkan adanya sejumlah persoalan, antara lain minimnya keragaman jenis tanaman, kurang memadainya fasilitas dan infrastruktur pendukung, munculnya genangan air karena sistem drainase yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Permasalahan tersebut menjadi indikasi bahwa implementasi kebijakan masih belum berjalan optimal.

Beberapa studi sebelumnya juga membahas isu serupa dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian oleh Muhammad Rezwan (2023) dari STIA Amuntai mengkaji pelaksanaan program RTH di Kabupaten Balangan, khususnya pada tiga lokasi: RTH Batumandi, RTH Mantimin, dan RTH Taman Hijau. Temuan peneliti menunjukkan bahwa implementasi program masih kurang maksimal karena adanya keterbatasan pada kompetensi petugas, minimnya dukungan dari instansi terkait, serta kondisi sosial masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung. Sementara itu, Fitria, Helmi, dan Syamsir (2020) dari Universitas Jambi meneliti implementasi kebijakan RTH melalui pengembangan taman kota. Mereka menyimpulkan bahwa luas taman yang tersedia masih jauh dari ketentuan perundang-undangan, sehingga program belum berjalan optimal sesuai Perda Kota Jambi dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam substansi, namun berbeda pada lokasi dan pendekatannya. Bila Rezwan menggunakan teori Sabatier, maka penelitian ini menerapkan pendekatan teori George C. Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Fokus penelitian ini ialah pada pelaksanaan Program Pengembangan RTH dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhinya sebagai bahan masukan untuk kebijakan mendatang.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai bagaimana pelaksanaan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Taman Bermain Bersahaja yang diterapkan di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fokus utama dalam kajian ini adalah untuk menelusuri kesesuaian implementasi program dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2020 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Subjek penelitian meliputi para pelaksana program, petugas lapangan, dan masyarakat yang terlibat maupun terdampak oleh kegiatan tersebut.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan program. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yakni dengan mempertimbangkan individu yang memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung dalam implementasi program. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, terdiri dari unsur pemerintah daerah, pelaksana teknis, hingga masyarakat penerima manfaat.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan inti: reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

A. Implementasi program pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Komunikasi

Komunikasi memainkan peranan yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan publik. Suatu implementasi dapat dikatakan efektif apabila para pengambil keputusan memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemahaman tersebut hanya dapat tercapai apabila proses komunikasi berlangsung secara optimal, sehingga setiap keputusan kebijakan beserta aturan pelaksanaannya dapat tersampaikan dengan baik kepada personel yang berwenang. Tidak hanya itu, isi dari kebijakan yang disampaikan juga harus memenuhi unsur kejelasan, ketepatan, dan konsistensi. Komunikasi yang efektif menjadi sarana penting agar baik pengambil keputusan maupun pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya secara selaras dan konsisten di tengah masyarakat.

a. Transmisi (Penyampaian Komunikasi)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penyaluran komunikasi sudah cukup baik, terdapat komunikasi antar instansi, atasan dengan petugas, petugas dengan pedagang, dan pemberitahuan kepada masyarakat di RTH dan Taman melalui spanduk atau papan informasi yang tersedia.

Hal ini selaras dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (2019:136–141), yang menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas transmisi atau penyaluran komunikasi. Komunikasi yang baik dapat menunjang tercapainya implementasi kebijakan yang optimal. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kesalahpahaman akibat komunikasi yang melalui banyak jenjang birokrasi, sehingga informasi yang disampaikan dapat mengalami distorsi. Selain komunikasi, Edward III juga menekankan pentingnya komponen lain seperti ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung sebagai elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan..

b. Kejelasan Komunikasi

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa aspek kejelasan informasi dalam pelaksanaan program masih mengalami beberapa hambatan. Penyampaian informasi belum sepenuhnya merata dan terkadang menimbulkan kesalahpahaman di antara pelaksana maupun masyarakat, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme komunikasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Salah satu indikatornya terlihat dari media komunikasi seperti spanduk atau papan informasi yang digunakan belum memenuhi fungsi informatif secara optimal. Beberapa spanduk terpasang dengan tulisan yang kurang terbaca, dan sebagian papan informasi mengalami kerusakan atau kehilangan sebagian konten informatif yang semestinya disampaikan kepada masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip kejelasan komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III (2019:136–141) belum sepenuhnya terimplementasi. Dalam teorinya, Edward menekankan bahwa informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas, tidak membingungkan, serta bebas dari ambiguitas. Meskipun ketidakjelasan komunikasi tidak selalu menggagalkan pelaksanaan kebijakan, namun dalam

pelaksanaannya, kejelasan sangat penting untuk memastikan setiap tahapan kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan awal. Ketika informasi tidak tersampaikan dengan tepat, hal ini berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda di tingkat pelaksana, sehingga menghambat efektivitas program.

Kejelasan dalam komunikasi memiliki hubungan yang signifikan dengan elemen implementasi lainnya, seperti ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan tatanan birokrasi. Oleh karena itu, agar kebijakan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah, diperlukan sarana komunikasi yang mampu menyampaikan informasi secara jelas, mudah dimengerti, serta dapat diakses oleh para pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima manfaat program.

c. Konsistensi Komunikasi

Hasil temuan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi menunjukkan bahwa aspek konsistensi komunikasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari minimnya interaksi langsung antara petugas pengelola dengan masyarakat sekitar. Banyak warga menyatakan bahwa mereka belum pernah berkomunikasi langsung dengan petugas lapangan. Meskipun komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dilakukan, namun penggunaannya terbatas hanya pada pemberitahuan acara tertentu dan tidak menjangkau informasi rutin atau penting lainnya.

Selain itu, beberapa papan informasi yang terpasang mengalami kerusakan fisik seperti patah atau rusak, yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang seharusnya diketahui. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan pelanggaran aturan secara tidak sengaja karena kurangnya pemahaman akibat ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku di kawasan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip konsistensi dalam komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh George C. Edward III (2019:136–141) belum sepenuhnya terwujud. Dalam teorinya, Edward menegaskan bahwa perintah atau instruksi yang disampaikan dalam proses implementasi kebijakan haruslah bersifat konsisten dan tidak berubah-ubah. Ketidakkonsistenan dalam penyampaian informasi dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana maupun penerima manfaat kebijakan, serta berpotensi menghambat jalannya program secara menyeluruh.

Dengan demikian, agar pelaksanaan program RTH dan taman bermain dapat berjalan lebih efektif, diperlukan sistem komunikasi yang lebih terstruktur, rutin, dan berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui media informasi yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, kebijakan yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya meliputi beberapa elemen utama, yaitu

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan tergolong cukup memadai. Petugas lapangan menjalankan tugasnya sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing.

Temuan ini mendukung teori dari George C. Edward III (2019:136–141), yang menegaskan bahwa SDM merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kegagalan seringkali muncul akibat keterbatasan jumlah atau rendahnya kapasitas personel yang terlibat. Maka dari itu, selain kuantitas personel yang cukup, kemampuan teknis dan profesionalisme pelaksana menjadi kunci utama agar kebijakan dapat dijalankan secara optimal..

b. Informasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi terkait Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan belum berjalan optimal. Banyak warga yang belum pernah berinteraksi langsung dengan petugas, papan informasi mengalami kerusakan, dan spanduk imbauan hanya tersisa satu dalam kondisi rusak. Akibatnya, sejumlah masyarakat masih melanggar aturan yang berlaku di area tersebut.

Kondisi ini belum mencerminkan implementasi teori George C. Edward III (2019:136–141), yang menekankan pentingnya dua jenis informasi dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu: (1) informasi tentang cara pelaksanaan kebijakan yang harus dipahami oleh pelaksana, dan (2) informasi mengenai tingkat kepatuhan terhadap peraturan. Tanpa kejelasan informasi ini, efektivitas kebijakan sulit tercapai.

c. Wewenang

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, serta dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan sudah berjalan secara cukup optimal. Petugas lapangan memahami dengan baik peran, tanggung jawab, dan hak mereka dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan taman dan RTH tersebut.

Temuan ini menguatkan pandangan George C. Edward III (2019:136–141), yang menekankan bahwa kewenangan merupakan salah satu komponen esensial dalam proses implementasi kebijakan publik. Kewenangan yang diberikan secara formal memberikan legitimasi bagi pelaksana untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penting pula adanya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan yang merugikan kepentingan umum.

d. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan masih tergolong kurang memadai. Beberapa fasilitas mengalami kerusakan, akses jalan mengalami genangan, dan alat pendukung kebersihan masih terbatas jumlahnya.

Keadaan ini belum mencerminkan standar yang dijelaskan oleh George C. Edward III (2019:136–141), yang menyatakan bahwa keberadaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan kebijakan cenderung mengalami hambatan, meskipun sumber daya manusia dan aspek kewenangan telah tersedia dengan baik.

3. Disposisi

Agar implementasi kebijakan berlangsung secara efektif, pelaksana tidak hanya dituntut memahami tugas yang harus dilakukan, tetapi juga wajib memiliki kapasitas dan keterampilan yang diperlukan, sehingga pelaksanaannya dapat terhindar dari penyimpangan atau

ketidaksesuaian.

a. Sikap Para Pelaksana

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa para pelaksana di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja yang berada di wilayah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah menunjukkan sikap yang cukup positif. Hal ini terlihat dari komitmen dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan peran secara profesional serta sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (2019:136–141), yang menyatakan bahwa sikap pelaksana memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan. Jika pelaksana menunjukkan sikap yang tidak mendukung arah kebijakan yang ditentukan oleh otoritas, maka akan muncul hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemilihan individu untuk melaksanakan kebijakan seharusnya mempertimbangkan komitmen dan dedikasi mereka terhadap tujuan kebijakan, khususnya dalam hal pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.

b. Melakukan Pengaturan Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian insentif di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja yang berlokasi di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemberian insentif atau bentuk penghargaan tambahan, seperti tip atau bonus, yang diberikan kepada para petugas lapangan.

Kondisi tersebut belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (2019:136–141), yang menekankan bahwa insentif merupakan salah satu sarana strategis dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Menurutnya, pelaksana cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga insentif dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi perilaku mereka agar lebih selaras dengan tujuan kebijakan. Dengan memberikan keuntungan tambahan atau mengurangi beban tertentu, pelaksana kebijakan akan terdorong untuk melaksanakan tugas secara lebih baik dan bertanggung jawab.

4. Struktur birokrasi

Meskipun sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, para pelaksana memahami langkah-langkah yang harus dilakukan, serta memiliki komitmen untuk melaksanakannya, keberhasilan implementasi kebijakan tetap dapat terhambat apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kompleksitas suatu kebijakan sering kali memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Jika struktur birokrasi yang ada tidak mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, maka efisiensi pemanfaatan sumber daya akan terganggu, dan motivasi para pelaksana cenderung menurun. Hal ini pada akhirnya akan menjadi penghambat dalam proses implementasi. Oleh karena itu, birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu menjalankan fungsi koordinatif secara optimal agar kebijakan yang telah ditetapkan secara politis dapat terlaksana secara efektif di lapangan.

a. Adanya Standar Operating Procedures (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini tampak dari terbatasnya perlengkapan kerja serta sarana pendukung yang dibutuhkan oleh petugas untuk melaksanakan tugasnya secara efektif di lapangan.

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mengacu pada teori George C. Edward III (2019:136–141), yang menekankan pentingnya SOP sebagai pedoman baku untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai standar yang ditetapkan, demi menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Adanya Pembagian Tugas dan Tanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah terlaksana dengan baik. Hal ini tercermin dari koordinasi antar pelaksana dalam membersihkan dan merawat area RTH dan taman bermain tersebut.

Kondisi tersebut selaras dengan pandangan George C. Edward III (2019:136–141), yang menjelaskan bahwa pembagian tanggung jawab atau fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mendistribusikan tugas secara terstruktur kepada unit-unit kerja sesuai dengan lingkup kewenangan dan fungsinya masing-masing.

Dengan struktur birokrasi yang terfragmentasi secara tepat, implementasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih efektif oleh organisasi yang memiliki kompetensi dan kapabilitas masing-masing.

c. Konsistensi

Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan tugas di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja yang berlokasi di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tergolong cukup baik. Indikasi ini terlihat dari kegiatan rutin para petugas yang membersihkan area tersebut setidaknya satu kali dalam setiap pekan.

Namun demikian, hal ini belum sepenuhnya mencerminkan implementasi teori menurut George C. Edward III (2019:136–141), yang menekankan bahwa konsistensi merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas kinerja dan perilaku organisasi secara berkelanjutan dan dapat diandalkan.

B. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup sejumlah aspek yang memiliki peranan signifikan dalam mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Beberapa faktor utama yang berpengaruh antara lain:

1. Faktor Penghambat
   a. Kejelasan komunikasi pada masyarakat kurang baik.

      Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam pelaksanaan program belum terlaksana secara maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan spanduk yang sulit dibaca serta papan informasi yang isinya tidak lengkap atau mengalami kerusakan.

   b. Komunikasi yang dijalankan tidak konsisten

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa

konsistensi komunikasi dalam pelaksanaan program Ruang Terbuka Hijau dan Taman Bermain Bersahaja belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari minimnya interaksi langsung antara masyarakat dan petugas, penggunaan WhatsApp yang terbatas hanya pada pemberitahuan acara tertentu, serta kondisi papan informasi yang rusak sehingga berpotensi menyebabkan pelanggaran akibat kurangnya informasi.

c. Informasi yang tidak sampai ke masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, disimpulkan bahwa penyampaian informasi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan belum optimal. Masyarakat umumnya tidak pernah berinteraksi langsung dengan petugas, beberapa papan informasi dalam kondisi rusak atau hilang, dan hanya tersisa satu spanduk imbauan kebersihan yang sudah tidak layak. Akibatnya, masih banyak warga yang melanggar aturan karena tidak mengetahui informasi yang seharusnya tersedia di lokasi.

d. Pembangunan sarana dan prasarana RTH dan Taman tidak menjadi prioritas.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan belum memadai. Hal ini terlihat dari berbagai fasilitas yang memerlukan perbaikan atau penambahan, akses jalan yang sering tergenang air, serta keterbatasan alat kebersihan yang menghambat pemeliharaan kawasan tersebut secara optimal.

e. Pelaksanaan SOP terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja Kecamatan Daha Selatan masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas pendukung serta alat kerja yang dibutuhkan oleh petugas dalam melaksanakan tugas harian mereka secara efektif dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

f. Tidak adanya insentif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja Kecamatan Daha Selatan belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya insentif tambahan yang diterima oleh para petugas dalam menjalankan tugas mereka.

2. Faktor Pendukung

a. Adanya penyaluran komunikasi yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penyaluran komunikasi sudah cukup baik, terdapat komunikasi antar instansi, atasan dengan petugas, petugas dengan pedagang, dan pemberitahuan kepada masyarakat di RTH dan Taman melalui spanduk atau papan informasi yang tersedia.

b. Petugas pembersihan sudah sesuai dengan kemampuannya

Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja Kecamatan Daha Selatan tergolong cukup baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kompetensi dan keterampilan masing-masing petugas.

c. Wewenang yang diberikan dijalankan dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wewenang di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari kesadaran para petugas terhadap hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga serta merawat lingkungan RTH dan taman tersebut.

d. Sikap para pelaksana sudah cukup baik

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja yang cukup memadai. Hal ini tercermin dari etika kerja para petugas serta cara mereka menjalankan tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola area publik tersebut secara rutin dan profesional.

e. Adanya koordinasi antar petugas

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa sistem birokrasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berjalan secara efektif. Setiap petugas memahami peran serta tanggung jawab masing-masing, dan terdapat koordinasi yang cukup baik antara personel maupun antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

f. Kerjasama antar petugas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya pembagian peran di antara para petugas serta kesadaran mereka dalam menjalankan tugas menjaga kebersihan dan ketertiban di area tersebut.

g. Konsistensi dalam mengerjakan tugas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat konsistensi pelaksanaan tugas di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong cukup baik. Hal ini tercermin dari rutinitas petugas yang secara teratur melakukan pembersihan setidaknya satu kali dalam seminggu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program ini secara keseluruhan telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan sejalan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator keberhasilan, di antaranya aspek komunikasi, kualitas sumber daya manusia, kewenangan pelaksana, sikap kerja, sistem birokrasi, pembagian tanggung jawab, serta konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Meskipun masih terdapat hambatan dalam penyampaian informasi, komunikasi antara petugas, pimpinan, dan masyarakat pada dasarnya telah membentuk pola koordinasi yang berfungsi dengan cukup baik. Sumber daya manusia yang terlibat juga menunjukkan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas secara teknis maupun administratif. Pelaksanaan wewenang

dilakukan secara bertanggung jawab, mencerminkan pemahaman atas peran dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Selain itu, sikap para pelaksana mencerminkan komitmen terhadap kebersihan, kenyamanan, serta keberlangsungan fungsi taman dan RTH. Dari sisi pengelolaan birokrasi, telah terlihat sistem kerja yang tertata melalui pembagian tugas yang terstruktur dan pelaksanaan program yang konsisten.

Namun, di sisi lain, implementasi program ini belum sepenuhnya mencapai kondisi ideal. Terdapat beberapa hambatan yang menghambat optimalisasi hasil program, seperti belum maksimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat akibat spanduk yang tidak terbaca dengan baik, papan informasi yang rusak, dan komunikasi yang hanya terbatas melalui jalur informal. Selain itu, konsistensi kehadiran petugas di lapangan serta kualitas komunikasi publik masih perlu ditingkatkan. Fasilitas penunjang kegiatan di area RTH dan taman juga belum memadai, baik dari segi kelengkapan maupun kondisi fisik, yang berpengaruh terhadap kenyamanan dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, kurangnya insentif bagi petugas lapangan turut menjadi faktor penghambat dalam menjaga semangat dan kualitas kerja pelaksana program.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberhasilan dan hambatan yang telah diidentifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa program pengembangan RTH dan Taman Bermain Bersahaja di Kecamatan Daha Selatan berada dalam kategori pelaksanaan yang cukup baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan. Esensi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan sistem informasi yang efektif, peningkatan fasilitas, dan penyediaan insentif sebagai upaya untuk memperkuat keberlanjutan program serta meningkatkan kualitas ruang publik sebagai sarana rekreasi, interaksi sosial, dan pelestarian lingkungan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) ‘Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah’, *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Anonim. 2007. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Anonim. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Dikawasan Perkotaan.

Anonim. 2020. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Agustino, Leo. 2019. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta.

Fitria, Helmi, dan Syamsir. 2020. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Dikota Jambi. Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) ‘Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.

Rezwan, Muhammad. 2023. Implementasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Balangan (studi kasus RTH Batumandi, RTH Mantimin, dan RTH Taman Hijau). STIA Amuntai.

Setiawan, I. (2025) ‘Fenomena Penggunaan Sepeda Listrikdi Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2023. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke lima. Bandung: Alfabeta